



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



REVIEW RENSTRA PPN KARANGANTU 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat karunia-Nya, Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dapat menyusun “Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2020-2024” sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Pada Renstra PPN Karangantu 2020-2024 penetapan Visi dan Misi dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Arah Presiden dan program-program prioritas pembangunan kelautan dan perikanan dalam RPJMN akan menjadi muatan utama dalam dokumen Renstra PPN Karangantu 2020-2024, Rencana Kerja (Renja) PPN Karangantu, dan untuk prioritas program dan kegiatan tahun 2020 serta periode tahun 2021-2024.

Penyusunan Renstra ini disusun untuk mengimbangi dinamisnya sub sektor perikanan tangkap serta sebagai acuan dalam rangka penyusunan perencanaan dan merumuskan program serta kegiatan-kegiatan khususnya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu guna mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode tahun 2020-2024. Kami mengharapkan dukungan seluruh semua pihak, baik dari pengguna jasa pelabuhan, instansi terkait dan masyarakat sekitar pelabuhan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Kami mengharapkan masukan dan sumbangan pemikiran dari seluruh pihak sehingga dokumen Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu ini dapat tersusun. Semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia khususnya di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dan sekitarnya.

Serang, Januari 2024

**Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Karangantu**



Parlingoman Tampubolon, S.Pi.M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB1 PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum.....	2
B. Potensi dan Permasalahan	6
C. Lingkungan Strategis.....	7
BAB2 VISI, MISI, DAN TUJUAN	
A. Pembangunan Nasional.....	13
B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan.....	15
C. Pembangunan Perikanan Tangkap	16
D. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	18
E. Sasaran Program Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.....	20
BAB3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional	21
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	26
C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap	33
D. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	36
E. Kerangka Regulasi	39
F. Kerangka Kelembagaan.....	42
BAB4 INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Indikator Kinerja	53
B. Kerangka Pendanaan.....	63
BAB5 PENUTUP	
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Kerangka Regulasi	65
Lampiran 2: Kerangka Pendanaan	73

BAB 1 | PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Kegiatan pembangunan sub sektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 7,53 juta ton sampai tahun 2019.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

A. Kondisi Umum

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. PPN Karangantu terletak di Jalan Pelelangan Ikan Desa Banten Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten dengan letak geografis 06°02' LS dan 106°09' BT. Awal pembangunan pelabuhan perikanan Karangantu pada tahun anggaran 1975/1976 dan diresmikan pada tanggal 25 Mei 1978 melalui SK Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/Org/5/1978. Pada awalnya status PPN Karangantu ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai (type C) kemudian sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.29/MEN/2010 tanggal 30 Desember 2010 statusnya meningkat menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (tipe B) yang didahului dengan dikeluarkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2010 Nomor: B.3677/M.PAN-RB/12/2010 tentang Usulan Penataan UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu tahun 2020-2024 mengadopsi langsung dari visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan visi adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutanserta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong. Dan dengan misi antara lain 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; 3) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; dan 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis, yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pelabuhan perpedoman kepada peraturan- peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER/08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tangkap
9. Keputusann Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 20/PERMEN-KP/2021 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;

- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaankapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangandan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan padakegiatan penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut:

1). Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan,

kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2). Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPN Karangantu dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Potensi dan Permasalahan

Potensi pengembangan perikanan tangkap di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa potensi utama yakni sebagai berikut:

- **Kelimpahan stok SDI;** Pemberantasan IUU Fishing, intensifikasi alat tangkap ramah lingkungan, serta upaya pro-environment lainnya telah berhasil meningkatkan stok sumber daya ikan dalam 5 tahun terakhir. Secara faktual, nelayan di beberapa lokasi pun telah merasakan kemudahan dalam usaha penangkapan ikan.
- **Instrumen pengelolaan perikanan berbasis WPP;** Sejauh ini seluruh kondisi prasyarat utama dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis WPP telah terpenuhi; mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang telah disusun, penetapan dan operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP), maupun penetapan mekanisme pengaturan lainnya.

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

- **Kapasitas nelayan;** Rendahnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan produktif dan efisien serta yang ramah

lingkungan, dan rendahnya pengetahuan nelayan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan

- **Kesejahteraan nelayan;** Belum terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga nelayan serta rendahnya kemampuan nelayan dalam mengelola keuangan dalam menghadapi kerentanan usaha penangkapan ikan terhadap perubahan lingkungan dan cuaca.
- **Mindset masyarakat perikanan tangkap;** Usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan
- **Sarana prasarana usaha penangkapan ikan;** belum optimalnya infrastruktur pelabuhan perikanan, konektivitas sistem informasi yang kurang, struktur armada kapal perikanan yang didominasi kapal kecil dengan jangkauan yang terbatas, minimnya armada kapal perikanan yang memenuhi laik tangkap dan laik simpan, kurangnya pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang *reliable*, minimnya penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien
- **Konektivitas analisis dan pemantauan pemanfaatan usaha;** belum jelasnya mekanisme pendataan nelayan kecil, serta belum optimalnya integrasi perizinan usaha antara pusat-daerah, dan kurangnya intensifikasi penggunaan sistem IT

C. Lingkungan Strategis

Pembangunan perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya.

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasikan ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah permusan alternatif arah kebijakan.

Tabel1. Matriks SWOT Kegiatan di Lingkup PPN Karangantu

	<p>STRENGTH (S) Faktor kekuatan internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki fasilitas pelabuhan cukup lengkap; 2. Telah memiliki WKOPP, Masterplan dan DED; 3. Memiliki fishing ground yang beragam dengan potensi SDI yang besar (WPPN-RI 712, 572 dan 711); 4. Lokasi pelabuhan dekat dengan bandara soekarno-hatta, pelabuhan merak, stasiun kereta karangantu serta sarana jalan yang baik dan lancar sehingga memudahkan distribusi ekspor; 5. Tersedianya tenaga kerja yang siap untuk dilatih; 6. Memiliki jumlah nelayan dan masyarakat perikanan yang cukup besar dan potensial sehingga memungkinkan untuk munculnya pusat kegiatan perikanan yang lebih berkembang 7. Memiliki cold storage dan TPI Higienis. 	<p>WEAKNESS (W) Faktor kelemahan internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada areal industri perikanan; 2. Pengembangan dan penataan fasilitas belum sempurna dan banyak kekurangan; 3. Pemanfaatan fasilitas belum optimal; 4. Pengolahan ikan yang masih tradisional dan belum memiliki sertifikasi kelayakan pengolahan; 5. Alat tangkap ikan yang masih tradisional; 6. Sumber air terbatas; 7. Jumlah SDM PPN Karangantu terbatas dan sudah banyak memasuki usia pension; 8. Fasilitas sumber PNBP memerlukan peremajaan.
<p>OPPORTUNITIES (O) Faktor peluang eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsumsi ikan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun; 2. Industri pengolahan pasca panen yang belum banyak dikembangkan; 3. Penyediaan suku cadang mesin, Barang alat penangkapan (BAP) masih berasal dari luar pelabuhan; 4. Penyediaan logistik kapal masih terbatas; 5. Adanya lahan yang masih kosong di sebelah kiri alur kapal masuk sebagai lahan industri; 6. Kuliner masih belum banyak berkembang; 	<p>STRATEGI SO Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berpotensi untuk dikembangkan industri pengolahan ikan; 2. Berpotensi meningkatnya produktivitas perikanan tangkap; 3. Berpotensi sebagai wilayah terpadu perikanan di Provinsi Banten 	<p>STRATEGI WO Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Jumlah Kualitas SDM Yang Terlatih Dalam Bidang Administrasi/Teknis Manajemen Kepelabuhanan 2. Meningkatkan Dan Memberdayakan Kapasitas Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

<ol style="list-style-type: none"> 7. Banyaknya nelayan dari daerah lain yang mendarat di pelabuhan; 8. Dukungan Pemerintah daerah dalam pengembangan PPN Karangantu (masuk dalam RUTR Provinsi Banten, Zona inti kawasan mina politan kota serang dan sebagai kawasan Banten Water Front City); 9. Keinginan investor untuk melakukan investasi; 10. Sebagai penyangga muara baru dan muara angke. 		
<p>THREAT (T) Faktor ancaman eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendangkalan alur pelayaran; 2. Stock ikan yang semakin menurun; 3. Keberadaan PPI lain yang berdekatan dengan PPN Karangantu; 4. Pencemaran air akibat sampah yang berasal dari pasar tradisional dan masyarakat karangantu; 5. Nelayan disekitar pelabuhan masih berorientasi lokal dan sulit menerima pengembangan iptek, keterampilan dan kehadiran nelayan dari daerah lain; 6. Keterbatasan permodalan nelayan; 7. Investor enggan berinvestasi karena fasilitas yang belum memadai; 8. Kurangnya kemampuan nelayan dalam usaha penanganan hasil tangkapan. 	<p>STRATEGI ST Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan IPTEK di perikanan berkelanjutan 2. Memfasilitasi perkembangan usaha perikanan tangkap 	<p>STRATEGI WT Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan SDM Kelautan Dan Perikanan Yang Berkualitas Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan 2. Restrukturisasi Armada Penangkapan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Usaha Perikanan Tangkap < 30 GT

BAB

2

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Pembangunan Nasional

Visi Presiden

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional 2020-2024 akan menggunakan Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

Misi Presiden

Visi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak;
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan;
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan;
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
- Menumbuhkan Kewirausahaan;
- Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila;
- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur;

- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0;
- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru;
- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal;
- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan.

Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan;
- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi;
- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan;
- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial;
- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di pedesaan;
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga;
- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah.

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi;
- Mitigasi Perubahan Iklim;
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.

Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

- Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Revitalisasi Revolusi Mental;
- Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial;
- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya;
- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan;
- Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi.

Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

- Melanjutkan Penataan Regulasi;
- Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum;

-
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM;
 - Mengembangkan Budaya Sadar Hukum.

Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

- Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif;
- Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional;
- Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Aktualisasi Demokrasi Pancasila;
- Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional;
- Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi;
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien;
- Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Reformasi Pelayanan Publik.

Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis;
- Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah;
- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru.

Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP;
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

- 1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:**
 - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan;
 - b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
- 2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap**

-
- Perekonomian Nasional, yakni:**
- a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni:**
- a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati, serta;
 - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, yakni:**
- a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

C. Pembangunan Perikanan Tangkap

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap;
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan.

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap;

- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan;
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap.

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. **Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing padasub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
4. **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan

publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

D. Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu tahun 2020-2024 sesuai visi dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu melaksanakan 4 (empat) Misi dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap;
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan.

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap;
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan;
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.

Tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu adalah :

1. **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu**, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui peningkatan kesempatan dan ruang usaha bagi pelaku usaha perikanan, pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, penyediaan data perikanan untuk keperluan penelitian dan pengembangan di bidang perikanan tangkap, pemberdayaan/perindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. **Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi dan berkelanjutan; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan bertaraf nasional, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep *eco-infrastructure* di pelabuhan perikanan.
4. **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik prima melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

E. Sasaran Program Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2020-2024 direpresentasikan dalam sasaran program Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Sasaran program pembangunan perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2020-2024 sebagai berikut :

1. Nilai PNB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Karangantu, dengan indikator kinerja :
 - a. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Karangantu (Ton)
2. Produktivitas perikanan tangkap di PPN Karangantu Meningkat, dengan indikator kinerja :
 - a. Volume produksi perikanan tangkap PPN Karangantu (Ton).
3. Pengelolaan kapal perikanan dan alat pengangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Karangantu, dengan indikator kinerja :
 - a. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (produk).
4. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPN Karangantu, dengan indikator kinerja :
 - a. Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (produk);
 - b. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (orang);
5. Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Karangantu yang optimal, dengan indikator kinerja :
 - a. Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur (unit).
6. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu yang berdaya saing, dengan indikator kinerja :
 - a. Tingkat operasional PPN Karangantu (Nilai);
7. Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di PPN Karangantu, dengan indikator kinerja :
 - a. Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (orang);
8. Tata kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di PPN Karangantu, dengan indikator kinerja :
 - a. Laporan Data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan (Laporan);

9. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, dengan indikator kinerja :
 - a. Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (nilai);
 - b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu (persen);
 - c. Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Karangantu (nilai);
 - d. IP ASN PPN Karangantu (indeks);
 - e. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Karangantu (persen);
 - f. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN PPN Karangantu (persen);
 - g. Nilai IKPA lingkup PPN Karangantu (nilai);
 - h. Nilai Kinerja Anggaran PPN Karangantu (nilai).

BAB 3 | ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita di atas dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yakni melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi, Presiden juga

menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat serta mengembangkan infrastruktur klaster kelautan-perikanan.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, yang menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, agenda pembangunan Indonesia ke depan diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang juga telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dijabarkan dalam kerangka pikir sebagaimana **Gambar 3.1** dan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya

energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Kegiatan kelautan dan perikanan yang mendukung agenda memperkuat ekonomi, diantaranya melalui program prioritas peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, program prioritas peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan program prioritas ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan

dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara, melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.



Gambar 3.1. Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan Nasional

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha. *Major Project* yang diamanatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain: 1) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng; dan 2) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional, sebagaimana tertuang dalam penjelasan pada **Gambar 3.2**. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendukung *Major Project* lain diantaranya: 1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; dan 2) Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 	<p>25</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN: 3,3 Swasta: 21,7 	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
7	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024 	<p>30</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN: 7,2 KPBU dan Swasta: 22,8 	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)

Gambar 3.2. Major Project pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer/Hibah* ke daerah.

Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara KKP dengan K/L dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta).

Berdasarkan jабaran 7 Agenda Pembangunan Nasional dan *Major Project* di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengemban Agenda Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*), dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, serta industrialisasi.

-
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
 3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut sesuai dengan perkembangan pembangunan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. (DJPT)
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa.(DJPDS, BKIPM)
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. (DJPRL,DJPDKP dan BKIPM)
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. (BRSDM)

Untuk mencapai 5 arah kebijakan diatas, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah.Strategi pelaksanaan arah kebijakandiatas sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
 - b. Penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project*) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap; dan
 - 3) Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
 - c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas;
 - 2) Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan;
 - 3) Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD); dan
 - 4) Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs).
 - d. Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkapdengan kegiatan utama meliputi: perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait.

-
- e. Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP;
 - 2) Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersana melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project*) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah;
 - 3) Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi tanah nelayan; dan
 - 4) Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.
 2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Optimalisasi perikanan budidaya air payau melalui major project “Revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng” berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
 - b. Pengembangan perikanan budidaya air Laut
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air Tawar
 - d. Pengembangan budidaya ikan hias
 - e. Pengembangan budidaya rumput laut
 - f. Pengembangan pakan mandiri
 - g. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah (Provinsi)
 - h. Pembangunan fasilitas perbenihan
 - i. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan
 - j. Produksi induk unggul dan benih bermutu
 - k. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor

- l. Sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)
 - m. Sarana dan prasarana percontohan produksi serta usaha perikanan budidaya
 - n. Pembangunan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi saluran irigasi tambak dan keramba jaring apung
 - o. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - p. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya
 - q. Penguatan UPT perikanan budidaya
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Startegi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan
 - b. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik (koridor)
 - c. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
 - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
 - e. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan
 - f. Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah
 - g. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
 - h. Keikutsertaan dalam promosi skala internasional dan investasi
 - i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan
 - j. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri (Provinsi)
 - k. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen
 - l. Pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor
 - m. Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan
 - n. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang dirumuskan
 - o. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit

Pengolahan Ikan

- p. Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP yang dibina
 - q. Kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste
 - r. Sarana rantai dingin dan peralatan pengolahan yang disediakan
 - s. Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina
 - t. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - u. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi
 - v. uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan
 - w. Sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan
 - x. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 - y. Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan
 - z. Operasional pengawasan dan penjaminan mutu hasil produk perikanan
 - aa. Sarana dan prasarana pengujian mutu
 - bb. Penguatan UPT
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
 - b. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/ atau dimanfaatkan
 - c. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional
 - b. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari
 - c. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi
 - d. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar
 - e. Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
 - f. Meningkatkan lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki

rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan dan/ atau rencana aksi pengelolaan

- g. Pengelolaan Biofarmakologi
 - h. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
 - i. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - j. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - k. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - l. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
 - m. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
 - n. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP yang efektif
 - o. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
 - p. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - q. Penyadartahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
 - r. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik
 - s. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri
 - t. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan karantina
 - u. Peningkatan UPT
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Hasil riset yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan dan sektor industri
 - b. Iptek hasil kegiatan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat

-
- c. SDM KP peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan)
 - d. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
 - e. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
 - f. Pelatihan masyarakat KP yang bersertifikasi kompetensi
 - g. Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP
 - i. Peningkatan UPT
6. Tatakelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Indeks Profesionalisme ASN
 - b. Indek SPBE
 - c. Level maturitas SPIP
 - d. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP
 - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP
 - f. Nilai / Predikat Sakip KKP

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatifadaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan

sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya: 1) Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut; 2) Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; 3) Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut; 4) Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan; 5) Melestarikan wilayah pesisir dan laut; 6) Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih; 7) Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan; 8) Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan; 9) Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan 10) Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: 1) Penguatan prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3) Penyiapan roadmap PUG; 4) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; 5) Pembuatan profil gender; dan 6) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah 1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati; 2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan 3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pematapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

Pembangunan sebuah sub sektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis; mempertimbangkan isu terkini serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan

pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah sub sektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 **“memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”** dan agenda 2 **“mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan”**. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan *stakeholder* serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 aspek utama yakni: 1) Manajemen nelayan; 2) Manajemen sumber daya ikan; serta utilisasi keduanya melalui 3) Manajemen usaha penangkapan ikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen Nelayan

Manajemen nelayan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap *social security* nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap *social security* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan

permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

2. Manajemen Sumber Daya Ikan

Manajemen sumber daya ikan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (sumber daya ikan dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat-daerah.

Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e-logbook, penempatan observer, serta peningkatan kepatuhan pada laporan LKU-LKP. Optimalisasi manajemen sumber daya ikan, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPP diterapkan secara penuh. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan kegiatan pengelolaan perizinan.

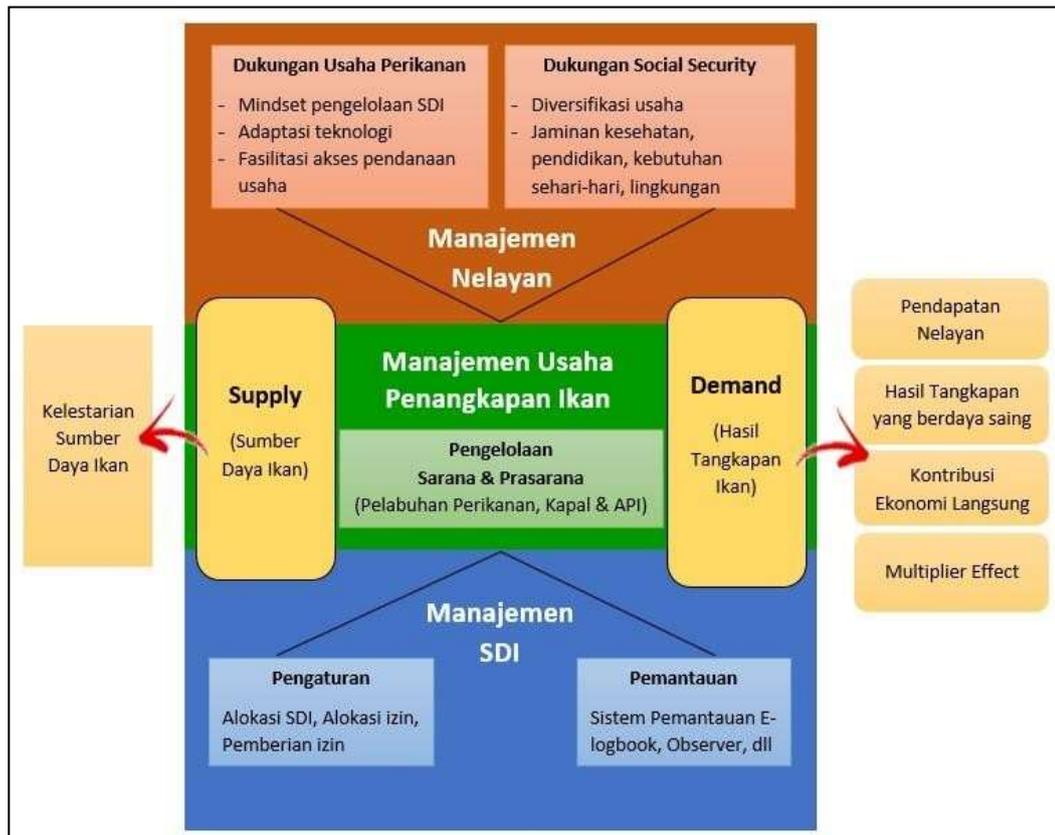
3. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan

Manajemen usaha penangkapan ikan berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan supply (sumber daya ikan) dan pemenuhan demand (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai outcome pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta *multiplier effect* lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal. Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan *supply* dan *demand*. Untuk memenuhi keseimbangan *supply-demand* tersebut, hubungan 3 aspek

utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan antara *stakeholder* nelayan, pengusaha, dengan pemerintah (**Gambar 3.3**). Penggunaan pendekatan *supply-demand* juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 3.3. Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap

Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan sub sektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan

tangkap ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.



Gambar 3.4. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

1. Kebijakan Pokok

a. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual

Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan: 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap; 2) Konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan; 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan; 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; 5) Kunjungan kerja dan diskusi stakeholders di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggungjawab berbasis website dan transparansi, dan berbasis riset dan pengetahuan faktual.

b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Optimalisasi Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap

Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi sarana-prasarana penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efiseinsi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikadan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;

- c) Peningkatan standardisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- d) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- e) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
- f) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
- g) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- h) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; 4. Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2) **Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi**

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat

dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/ transportasi.

Pengelolaan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;
- b) Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran; intensifikasi pelibatan pemerintah daerah;
- c) Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- d) Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- e) Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;

- f) Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- g) Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan; 2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D(Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); 3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah; 4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.

3) **Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)**

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan umum daratan; mempertimbangkan

tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan umum daratan seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan *observer on board* pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan observer di atas kapal perikanan;
- c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- d) Peningkatan produktivitas perairan umum daratan, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat);
- e) Peningkatan produktivitas ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO; dan
- f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan basis data pengalokasian SDI; intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (<i>backward linkage</i>);
2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan overfishing dan optimalisasi perairan

underfishing; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (*forward linkage*), seperti dalam alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP;

3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemda terkait operasionalisasi WPP, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan umum daratan.

4) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries* (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kemenhub) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan *e-service* dan *platform* yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai di daerah;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*;
- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan

usaha perikanan tangkap; dan

- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan BPKP oleh pemerintah daerah
2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah
3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara

5) **Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan**

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan *social security* masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi *force majeure* seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar

sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Perlindungan dan bantuan nelayan melalui bantuan premi asuransi nelayan, termasuk perluasan skema asuransi mandiri, bantuan sarana penangkapan ikan, dll;
- c) Pemberdayaan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), dll;
- e) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan dan intensifikasinya termasuk melalui akses LPMUKP dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan; dan
- f) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan database kenelayanan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta;2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif;3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan mindset dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek. |
|--|

c. **Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas**

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) *Human Capital*; 2) *Organisation Capital (Right Sizing Organisation)*; 3) *Finacial and Planning Capital*; 4) *Information Capital*, serta 5) *Control Capital*.

Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja *think-tank*; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (*quick analysis*), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEMDA	KKP
PU-PERA Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
KEMEN-ATR Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
KEMENDAGRI Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
KEMEN-KOPERASI Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kenelayan	Riset teknologi perikanan tangkap
KEMHUB Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
KEMENDES Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
KEMENKOMAR Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	BUMN
	Integrasi sistem perizinan	Swasta
	Pengembangan pelabuhan	

Gambar 3.5. Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

2. Kebijakan Pengarusutamaan

a. Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep *eco fishing port*; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.

b. Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

c. Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

d. Transformasi digital

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook*, *e-services* perizinan, *e-layar*, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan *multiplier effect* pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)	Merupakan platform pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini merupakan salah

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
	satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap
Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol	Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai Rp 7 Triliun. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi
Penyederhanaan regulasi	Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan transshipment, batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan
Pelabuhan Perikanan Unggul	Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) <i>Eco Fishing Port</i> , yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan
Kampung Nelayan Maju	Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari-kuliner
Armada Perikanan yang Kompetitif	Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran (<i>traceability</i>), standar keamanan kapal,

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
	penanganan ikan (<i>fish handling</i>), serta standar keselamatan kerja

D. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 **“memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”** dan agenda 2 **“mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan”**. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dalam statusnya sebagai UPT-Pusat yang operasionalnya berada di daerah, maka arah dan kebijakan organisasi diupayakan untuk senantiasa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat, serta berupaya untuk menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi sinergi program dan kegiatan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Guna mewujudkan sasaran persentase pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima dalam operasional pelabuhan perikanan dengan fasilitas produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar, maka kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan adalah melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan

Dalam pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan terhadap pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pelayanan jasa dan fasilitas usaha perikanan; fasilitas dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; fasilitas publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan, maka upaya peningkatan pelayanan terhadap aktifitas tersebut terus diupayakan secara optimal. Kebijakan PPN Karangantu dalam peningkatan pelayanan tersebut ditempuh antara lain melalui upaya penerapan *Standart Operation Procedure (SOP)*; peningkatan

kapasitas SDM pelabuhan melalui diklat, bimtek,dll; penyediaan peralatan pendukung pelayanan, pemasangan papan penerangan/informasi pelayanan, penyebaran data dan informasi tepat sasaran, pertemuan dengan stake holders melalui kegiatan *coffee morning* dan diskusi langsung dilapangan; dan sosialisasi ketentuan/peraturan yang terkait dengan pelayanan kepelabuhanan.

2. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan

Guna mewujudkan PPN Karangantu sebagai kawasan minapolitan, maka upaya peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan terus diupayakan secara optimal untuk memfasilitasi seluruh kegiatan pelayanan kepelabuhanan, sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya usaha perikanan maupun usaha pendukung lainnya mulai dari pra produksi, produksi sampai pasca produksi, sehingga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, perkembangan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya menuju pada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan tersebut meliputi penyempurnaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan antara lain: pematangan lahan pelabuhan, MCK, IPAL, cold storage dan docking kapal, sarana perbengkelan, Retaining Wall, jalan akses menuju dock kapal, pengerukan kolam dan alur pelabuhan secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Pemeliharaan fasilitas operasional lainnya juga akan senantiasa memperoleh perhatian secara proporsional.

3. Pengembangan sistem informasi perikanan

Kebijakan pengembangan system informasi perikanan diarahkan pada peningkatan kualitas, akurasi data sebagai informasi perikanan di PPN Karangantu dengan beberapa ragam penyampaian informasi baik dalam bentuk buku statistik, leaflet maupun poster dengan pengembangan jejaring distribusi informasi diantaranya melalui media cetak dan elektronik, sosialisasi, dan visitor.

Program Pembangunan

Pembangunan perikanan tangkap sebagai bagian penting dari pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan perikanan tangkap dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan, yaitu: (1) Kesejahteraan nelayan meningkat, (2) Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, (3) Pemanfaatan sumber daya perikanan sesuai ketentuan, (4) Tata kelola sumber

daya perikanan bertanggung jawab, (5) Produksi perikanan tangkap meningkat, dan (6) Tata kelola Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang baik.

Program pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu mengacu kepada kebijakan strategis Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui penjabaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui 6 (enam) kegiatan tersebut, dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target nasional pada agenda 1 **“memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”** dan agenda 2 **“mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan”**. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Diwujudkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu melalui sasaran strategis sebagai berikut: (1) Pendapatan Nelayan Meningkat, (2) Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, (3) Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, (4) Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, dan (5) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.

E. Kerangka Regulasi

Dalam rangka menciptakan iklim usaha di bidang perikanan tangkap, maka kerangka regulasi merupakan instrumen yang penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pembangunan industri perikanan tangkap nasional. Sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pusat, kerangka regulasi di Pelabuhan Pelabuhan Nusantara Karangantu mengadopsi langsung dari regulasi yang akan disusun, diperbaharui dan ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) selama periode 2020-2024.

F. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional. Kerangka kelembagaan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu sebagai unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) , sebagai berikut :



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

BAB 4

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja

1. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana tersaji berikut :

Tabel . Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Kesejahteraan nelayan meningkat	1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	102	103	105	106	107
	2 Rata-rata pendapatan Nelayan (Rp/nelayan/bulan)	3.952.000	4.229.000	4.548.000	4.911.000	5.360.000
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	3 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 80	≤ 80	≤ 80	≤ 80	≤ 80
3. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan	4 Nilai PNBP Ditjen Perikanan Tangkap (Rp. Miliar)	928,679	551,370	656,535	657,951	659,201
4. Tata kelola sumber daya perikanan bertanggung jawab	5 Persentase pengelolaan sumber daya ikan di perairan dan WPPNRI (persen)	100	100	100	100	100

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Produksi Perikanan Tangkap Meningkatkan	6	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	8,020	8,421	8,881	9,434	10,105
		7	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp triliun)	231,311	247,677	266,459	289,167	316,805
		8	Persentase dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap (persen)	100	100	100	100	100
6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik	9	Nilai kinerja reformasi birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	A(85)	A(85)	A(85)	A(85)	A(85)
		10	Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker)	9	12	16	19	23
		11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	60	61	62	63	64
		12	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	82	84	86	88	90
		13	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	14 Batas tertinggi persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2019 (persen)	1	1	1	1	1

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome dan output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran hasil (Outcome dan Output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja Eselon III.

Tabel 1. Indikator Kinerja PPN Karangantu 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1 Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Karangantu	1. Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Karangantu (Rp. Juta)	928,679	551,370	947,745	1.140,51	1.001,244
2 Produktivitas perikanan tangkap di PPN Karangantu meningkat	2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Karangantu (Ton)	-	-	-	2.400	2.443
3 Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang	3. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	-	-	50	50	-

berdaya saing di PPN Karangantu								
		4.	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	-	-	-	50	411
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPN Karangantu	5.	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	-	-	-	1	-
		6.	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	10	30	30	30	-
		7.	Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	-	-	-	5	25
5	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Karangantu yang optimal	8.	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	-	-	1	1	-
		9.	Persentase pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu (Persen)	-	-	-	30,10	30,10
		10.	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu (Persen)	-	-	-	75	75
6	Pengelolaan PPN Karangantu yang berdaya saing	11.	Tingkat Operasional PPN Karangantu (Nilai)	80	81	82	83	84
		12.	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Karangantu (Persen)	-	-	-	100	100
		13.	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Karangantu (Persen)	-	-	-	60	65

7	Pengelolaan • kenelayanan yang maju dan berdaya saing di PPN Karangantu	14.	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	50	12	24	20	-
8	Tata kelola • sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di PPN Karangantu	15.	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	20	21	50	50	-
9	Tata Kelola • pemerintah yang baik di lingkungan PPN Karangantu	16.	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK (Nilai)	45,10	45,10	45,10	45,10	45,10
		17.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Karangantu (Persen)	-	-	-	75	80
		18.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPN Karangantu(Nilai)	-	-	-	93	94
		19.	IP ASN PPN Karangantu (Indeks)	72	73	79	83	84

20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Karangantu (Persen)	-	-	75	77,5	80
21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Karangantu (Persen)	-	72,5	75	77	80
22.	Nilai IKPA PPN Karangantu (Nilai)	-	72,5	75	89	93,76
23.	Nilai Kinerja Anggaran PPN Karangantu (Nilai)	88	89	89	82	86
24.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Karangantu (indeks)	-	-	-	88,21	88,30

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan tangkap, serta mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Karena Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu merupakan Unit Pelaksana Teknis, maka pendanaan untuk mencapai target sasaran utama berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu dari Sekretariat, Direktorat Pelabuhan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan dan Direktorat Sumber Daya Ikan.

Pendanaan dari Sekretariat digunakan untuk Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pendanaan dari Direktorat Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Tangkap digunakan untuk mendukung pelaksanaan cek fisik kapal dan sertifikasi buat kapal dan awak kapal, sedangkan pendanaan dari Direktorat Pelabuhan Perikanan digunakan untuk pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu untuk mendukung pelaksanaan penyebaran informasi, pelaksanaan tugas kesyahbandaran, pelaksanaan pelayanan di pelabuhan perikanan, pelaksanaan operasional pelabuhan lainnya. Pendanaan dari Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan dan Direktorat Sumber Daya Ikan digunakan untuk mendukung sasaran kinerja dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

Secara rinci pendanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja dapat dilihat pada lampiran. **Lampiran 2.**

BAB 5 | PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dengan mengacu pada Renstra Ditjen Perikanan Tangkap yang telah disesuaikan dengan perubahan pada visi, misi, strategi dan kebijakan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan RENSTRA ini mengacu pada undang-undang No.25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang No,17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, Peraturan presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Renstra ini menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta merupakan acuan perencanaan setiap tahun.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, tapi yang lebih penting adalah pelaksanaan dari dokumen renstra dimaksud dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dalam pengembangan PPN Karangantu dan masyarakat luas.

Akhirnya kebersamaan dan kerja keras dari jajaran staf PPN Karangantu dan seluruh pemangku kepentingan di bidang perikanan tangkap pada umumnya merupakan hal yang mutlak dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterahkan nelayan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan.

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA RENSTRA PPN KARANGANTU 2020-2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Karangantu	1.	Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Karangantu (Rp. Juta)	928,679	551,370	947,745	1.140,51	1.001,244,
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Karangantu meningkat	2.	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Karangantu (Ton)	-	-	-	2.400	2.443
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Karangantu	3.	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	-	-	50	50	-
		4.	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	-	-	-	50	411
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPN Karangantu	5.	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	-	-	-	1	-

		7. Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	-	-	-	5	25
5	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Karangantu yang optimal	8. Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	-	-	1	1	-
		9. Persentase pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu (Persen)	-	-	-	30,10	30,10
		10. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu (Persen)	-	-	-	75	75
6	Pengelolaan PPN Karangantu yang berdaya saing	11. Tingkat Operasional PPN Karangantu (Nilai)	80	81	82	83	84
		12. Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Karangantu (Persen)	-	-	-	100	100
		13. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Karangantu (Persen)	-	-	-	60	65

RENCANA STRATEGIS*Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2020 -2024*

7	Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di PPN Karangantu	14. Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	50	12	24	20	-
8	Tata kelola sumber daya ikandi WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di PPN Karangantu	15. Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	20	21	50	50	-
9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Karangantu	16. Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK (Nilai)	45,10	45,10	45,10	45,10	45,10
		17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Karangantu (Persen)	-	-	-	75	80
		18. Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPN Karangantu (Nilai)	-	-	-	93	94
		19. IP ASN PPN Karangantu (Indeks)	72	73	79	83	84
		20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Karangantu (Persen)	-	-	75	77.5	80

21.		-	72,5	75	77	80
22.	Nilai IKPA PPN Karangantu (Nilai)	-	72,5	75	89	93,76
23.	Nilai Kinerja Anggaran PPN Karangantu (Nilai)	88	89	89	82	86
24.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Karangantu (indeks)	-	-	-	88,21	88,30

LAMPIRAN 2. KERANGKA PENDANAAN PERUBAHAN PPN KARANGANTU 2023

Kode	Program/kegiatan	Pagu Anggaran2023 (Rp)
A.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	12.244.672.000
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	43.000.000
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.657.371.000
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	40.200.000
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11.426.703.000